



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT**



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen **Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025/2026** ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis dalam mengukur capaian kinerja organisasi secara terarah, terukur, dan akuntabel guna mewujudkan visi **“Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen kendali yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025/2026. Dengan ditetapkannya IKU ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dapat berorientasi pada hasil (*outcome*), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang agama dan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029.

Penyusunan dokumen IKU ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada **Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia** atas bimbingannya, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini.

Akhirnya, semoga dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2025/2026 ini dapat menjadi acuan operasional yang efektif dalam pelaksanaan program, serta menjadi motivasi bagi seluruh jajaran ASN untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kinerja secara optimal demi tercapainya tujuan organisasi yang lebih baik.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat



Dr. H. Adnan Nota, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
• Latar Belakang	1
• Dasar Hukum	2
• Maksud dan Tujuan	3
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	4
• Definisi	4
• Dimensi Indikator	5
• Syarat dan Kriteria (SMART)	6
BAB III GAMBARAN UMUM	8
• Visi dan Misi	8
• Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)	9
• Indikator Kinerja Utama (Target 2025-2029)	10
• Analisis Resiko dan Metodologi	11
BAB IV PENUTUP	12
• Kesimpulan dan Harapan	12
• Komitmen Bersama	13
TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (SMART)	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi vertikal memiliki tanggung jawab strategis untuk mengimplementasikan kebijakan nasional di tengah karakteristik daerah yang dinamis. Kondisi geografis Sulawesi Barat yang terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah terpencil menuntut adanya instrumen pengukuran kinerja yang jelas dan terukur untuk memastikan layanan keagamaan dan pendidikan tetap inklusif serta berkeadilan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan amanat dari **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenag Sulawesi Barat untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045

B. Dasar Hukum

Penyusunan laporan IKU ini berlandaskan pada regulasi berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menjadi acuan kebijakan dalam pelaksanaan rencana kinerja, kegiatan, maupun anggaran di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Satuan Kerja Madrasah

2. Tujuan

Menyediakan parameter keberhasilan yang objektif melalui peningkatan profesionalisme ASN dan pencapaian sasaran strategis yang selaras dengan kebijakan nasional

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam sistem manajemen pemerintahan modern, setiap instansi wajib menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan kinerja serta memperkuat akuntabilitas organisasi. Secara fundamental, IKU didefinisikan sebagai **ukuran keberhasilan dari suatu tujuan strategis** yang telah ditetapkan sebelumnya. IKU bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen kendali yang digunakan oleh pimpinan untuk memastikan bahwa setiap gerak langkah organisasi, mulai dari tingkat provinsi hingga satuan kerja terkecil, tetap berada pada jalur pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan.

Berdasarkan tinjauan teoritis, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** yang menuntut adanya transparansi dalam setiap capaian. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, tujuan dari setiap program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang berfungsi untuk mengukur kemajuan konkret dalam pencapaian target tersebut. Tanpa indikator yang jelas, akan sangat sulit bagi unit kerja untuk menilai apakah suatu kebijakan atau kegiatan telah berhasil atau gagal, sehingga IKU menjadi landasan utama dalam melihat potret kinerja instansi secara objektif.

B. Dimensi Indikator

Penetapan indikator dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada klasifikasi yang komprehensif, mencakup lima dimensi utama sebagai berikut:

1. Masukan (Input): Segala sumber daya, seperti anggaran dan SDM, yang digunakan untuk menghasilkan output.
2. Keluaran (Output): Produk langsung dari sebuah kegiatan, misalnya jumlah dokumen perencanaan atau jumlah peserta pelatihan.
3. Hasil (Outcome): Manfaat jangka pendek yang dirasakan oleh penerima layanan, seperti meningkatnya indeks profesionalisme ASN.
4. Manfaat (Benefit): Kegunaan yang lebih luas dari hasil yang dicapai.

5. Dampak (Impact): Pengaruh jangka panjang terhadap masyarakat, seperti meningkatnya stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di daerah.

Indikator ini dirumuskan dalam bentuk **Metadata**, yang mencakup cara pengukuran secara matematis, variabel pembangun, serta penanggung jawab data untuk menjamin validitas informasi yang disajikan. Dengan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*), IKU memungkinkan organisasi melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memperbaiki kegagalan dan mempertahankan keberhasilan di masa yang akan datang

C. Syarat dan Kriteria

Untuk memastikan bahwa IKU yang ditetapkan benar-benar efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap indikator di lingkungan Kanwil Kemenag Sulawesi Barat wajib memenuhi kriteria **SMART**. Kriteria ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- S (Specific): Indikator harus memiliki tujuan yang jelas dan fokus. Tidak boleh ada ambiguitas dalam makna indikator, sehingga setiap orang dalam organisasi memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang sedang diukur.
- M (Measurable): Indikator harus terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini berarti capaian harus dapat dihitung dengan rumus tertentu, memiliki satuan yang jelas (seperti persen, nilai indeks, atau jumlah laporan), serta memiliki sumber data yang dapat diverifikasi.
- A (Achievable): Sasaran yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, potensi yang dimiliki, dan tantangan yang dihadapi. Target yang terlalu mustahil akan menurunkan motivasi, sementara target yang terlalu rendah tidak akan mendorong inovasi.
- R (Relevant): Indikator tersebut harus sesuai dengan kenyataan di lapangan serta selaras dengan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai contoh, indikator dalam bidang pendidikan madrasah harus relevan dengan peningkatan mutu lulusan dan kompetensi guru.
- T (Time-bound): Pencapaian kinerja harus berbasis waktu. Setiap indikator memiliki periode pelaporan yang jelas, baik itu triwulanan, semesteran, maupun tahunan, sesuai dengan target lima tahunan yang tertuang dalam Renstra 2025-2029.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, penetapan IKU diharapkan dapat menyediakan informasi kinerja yang sangat krusial bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang lebih berhasil dan tepat sasaran.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

B. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

Berdasarkan kondisi umum organisasi, dilakukan analisis untuk menentukan langkah strategis ke depan:

- Kekuatan (Strengths): Ketersediaan SDM yang kompeten, komitmen kuat terhadap moderasi beragama, serta implementasi sistem digital seperti SIPADU, SIMKEU, dan SPBE.
- Kelemahan (Weaknesses): Distribusi tenaga pendidik yang belum merata di daerah terpencil (Tutar, Ulumanda) dan belum optimalnya sertifikasi kompetensi teknis bagi sebagian ASN.
- Peluang (Opportunities): Dukungan nasional terhadap reformasi birokrasi tematik dan potensi sinergi dengan pemerintah daerah serta desa adat dalam penguatan layanan keagamaan.
- Ancaman (Threats): Meningkatnya potensi intoleransi digital dan penyebaran hoaks di media sosial yang dapat mengganggu harmoni social

C. Indikator Kinerja Utama

Target Indikator Kinerja Utama 2025-2029 Berikut adalah rincian target kinerja utama yang mencakup Bidang Agama dan Tata Kelola:

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IKSK)	Target 2025	Target 2029
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama dan toleransi	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,50	83,00
SK.11	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) > 75	80,00	100,00
SK.12	Meningkatnya tata kelola keuangan	Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	93,00	93,00
SK.13	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77,20	81,24
SK.17	Meningkatnya kualitas data/informasi	Indeks Pembangunan Statistik	1,00	2,00

D. Analisis Resiko dan Metodologi

1. Identifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

Untuk menjamin pencapaian IKU, Kanwil memitigasi risiko sebagai berikut:

- Risiko Konflik: Potensi provokasi intoleransi di media sosial. Mitigasi: Memperkuat dialog lintas agama dan literasi digital.
- Risiko SDM: Keterbatasan pemahaman area perubahan Reformasi Birokrasi (RB). Mitigasi: Pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan terkait area perubahan RB.
- Risiko Tata Kelola: Ketidaktertiban arsip digital. Mitigasi: Penerapan sistem persuratan berbasis aplikasi SRIKANDI.

2. Rumusan Pengukuran (Metadata)

Setiap indikator diukur dengan formula konkret. Misalnya, **Indeks Profesionalisme ASN (IKSK.13.1)** diukur menggunakan instrumen BKN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Pengukuran dilakukan secara tahunan oleh Bagian Tata Usaha.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Harapan

Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara saksama sebagai peta jalan organisasi untuk mencapai target pembangunan bidang agama dan pendidikan secara berkelanjutan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman fundamental bagi seluruh unit kerja Eselon II serta unit kerja di bawah naungan Kanwil Kemenag Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka selama periode lima tahun ke depan secara terstruktur dan terukur. Melalui implementasi IKU ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang didukung oleh budaya kerja bersih, melayani, dan berbasis transformasi digital yang inklusif.

Penyusunan Renstra ini juga merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenag Sulawesi Barat untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 demi mewujudkan visi "**Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Dengan sasaran strategis yang mencakup peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat, akses pendidikan madrasah yang berkeadilan, serta tata kelola keuangan dan BMN yang transparan, organisasi ini bertekad memberikan dampak nyata bagi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen ini sekaligus menjadi landasan utama bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta Satuan Kerja Madrasah dalam mengambil kebijakan operasional dan penganggaran berbasis kinerja di wilayah masing-masing.

B. Komitmen Bersama

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan dokumen strategis ini masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang perlu terus dievaluasi dan disempurnakan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja secara profesional serta penguatan kerja sama tim (*teamwork*) yang solid di seluruh tingkatan organisasi untuk memastikan setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal sesuai target tahunan. Keberhasilan pelaksanaan

program-program ini sangat bergantung pada kolaborasi, inovasi teknologi, dan komitmen seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam merespons tantangan geografis serta dinamika sosial budaya yang dinamis di Sulawesi Barat.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia atas bimbingannya, serta kepada semua pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian yang efektif untuk terus memperbaiki mutu pelayanan publik dan membawa pembangunan bidang keagamaan di Provinsi Sulawesi Barat menuju arah yang lebih berintegritas dan bermartabat.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by the name 'Adnan'.

Dr. H. Adnan Nota, M.A.

Tabel Indikator Kinerja Utama (SMART)

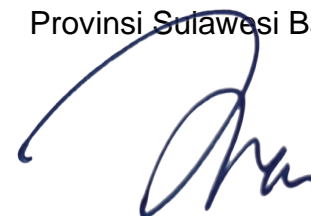
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Periode 2025–2029

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Specific (Khusus)	Measurable (Terukur)	Achievable (Mampu Dicapai)	Relevan	Time Bound (Waktu)
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Mengukur tingkat keharmonisan dan toleransi antarumat beragama di Sulawesi Barat melalui survei indeks persepsi.	Diukur dengan skala nilai (0–100) berdasarkan hasil survei nasional atau internal.	Mempertahankan status keharmonisan dengan target peningkatan tahunan yang realistis.	Mendukung misi meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun.	Tahunan, dievaluasi setiap akhir tahun anggaran.
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik	Mengukur kompetensi penyuluh (semua Bimas) dalam hal laporan harian, konten digital, dan kediklatan.	Persentase jumlah penyuluh bernilai baik dibanding total jumlah penyuluh yang dinilai.	Target ditingkatkan secara bertahap seiring dengan program penguatan kapasitas SDM.	Relevan dengan penguatan peran penyuluh sebagai garda terdepan layanan agama.	Diukur secara periodik setiap tahun.
3	Meningkatnya akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan,	Persentase peningkatan jumlah siswa pada pendidikan (Madrasah/	Mengukur perluasan jangkauan dan minat masyarakat terhadap	Persentase dihitung dari pertumbuhan jumlah siswa baru dibandingkan	Target pertumbuhan disesuaikan dengan kapasitas sarana prasarana yang dibangun.	Mendukung tujuan peningkatan akses pendidikan	Tahunan, dilaporkan pada setiap awal tahun ajaran baru.

	ramah, dan terjangkau	Keagamaan/ Pesantren)	pendidikan keagamaan.	tahun sebelumnya.		yang merata dan terjangkau.	
4	Meningkatnya kualitas lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri dan unggul	Rata-rata Nilai Literasi Membaca dan Numerasi	Mengukur kemampuan dasar literasi dan numerasi siswa melalui hasil asesmen madrasah/AKM.	Skor rata-rata hasil asesmen (AKM/ANBK) peserta didik pada satuan pendidikan.	Target skor rata-rata didasarkan pada baseline 2024 dengan peningkatan bertahap.	Mendukung penciptaan SDM unggul berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.	Tahunan, diukur setelah pelaksanaan asesmen nasional.
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Mengukur efektivitas dan kepatuhan dalam perencanaan serta realisasi penggunaan anggaran.	Nilai akumulatif dari aspek perencanaan dan implementasi (skala 0-100) sesuai standar Kemenkeu.	Target tahun 2025 sebesar 90,00 dan meningkat hingga 93,50 pada tahun 2029.	Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).	Tahunan, direkapitulasi setiap akhir tahun anggaran.
6	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Mengukur kemajuan unit kerja dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan pelayanan prima.	Nilai indeks pembangunan ZI yang harus berada di atas ambang batas 75.	Target nilai 80 pada tahun 2025, menuju target 100,00 pada tahun 2029.	Sejalan dengan komitmen membangun birokrasi yang bersih dan melayani.	Tahunan, berdasarkan hasil evaluasi tim penilai internal/nasional.
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Mengukur tingkat profesionalisme pegawai berdasarkan	Nilai indeks dengan skala 0–100 sesuai	Target baseline (2025) 77,20 meningkat menjadi	Penting untuk mendukung transformasi digital dan	Tahunan, diperbarui melalui sistem informasi kepegawaian.

			dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.	instrumen resmi pemerintah.	81,24 pada tahun 2029.	pelayanan publik yang unggul.	
8	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Indeks Pembangunan Statistik	Mengukur kematangan pengelolaan data dan statistik sektoral di lingkungan Kanwil.	Skor indeks yang diukur melalui klasifikasi empat skala pengukuran (nominal hingga rasio).	Target nilai 1 pada tahun 2025 dan stabil di nilai 2 pada tahun-tahun berikutnya.	Relevan dengan strategi pengambilan kebijakan berbasis data (<i>data-driven planning</i>).	Tahunan, dilaporkan melalui sistem monitoring internal.

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat



Dr. H. Adnan Nota, M.A.